

Pengembangan Kebijakan Pendidikan Islam

Sahroni^{*1}, Su'aidi², Minnah el Widdah², Nur Anisyah³, Indrawati³

¹IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

²UIN STS Jambi, Indonesia

³Institut Islam Ma'arif Jambi, Indonesia

Email: kangsahroni17@gmail.com*

Abstrak

Pengembangan kebijakan pendidikan Islam merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan global. Pendidikan Islam berperan penting dalam membentuk karakter dan moral generasi muda sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kebijakan pendidikan Islam dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan relevansi dan efektivitasnya. Metodologi yang digunakan mencakup studi literatur dan analisis kebijakan yang ada, serta wawancara dengan para pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kebijakan pendidikan Islam perlu memperhatikan aspek kurikulum yang inklusif, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif. Kesimpulannya, kebijakan pendidikan Islam yang adaptif dan inovatif akan mampu menjawab kebutuhan zaman dan berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas serta berakhlak mulia.

Kata Kunci: Pendidikan Islam; Pengembangan Kebijakan; Kurikulum Inklusif; Kompetensi Pendidik; Teknologi Pembelajaran; Tantangan Global; Ekosistem Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk moral dan karakter generasi muda sesuai dengan ajaran agama. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi dan transformasi sosial, pendidikan Islam dihadapkan pada tantangan yang kompleks dan multidimensional. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menjadikan pendidikan Islam tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman, sembari mempertahankan nilai-nilai keislaman yang menjadi fondasinya. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan pendidikan Islam menjadi sangat krusial.

Kebijakan pendidikan Islam harus mampu menjawab kebutuhan pendidikan yang terus berkembang dengan memperhatikan tuntutan zaman serta kebutuhan peserta didik. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kebijakan ini meliputi pembaruan kurikulum agar lebih inklusif, peningkatan kompetensi tenaga pendidik yang tidak hanya menguasai ilmu agama tetapi juga memahami perkembangan teknologi dan pedagogi modern, serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran.¹

Selain itu, pengembangan kebijakan pendidikan Islam juga perlu melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan organisasi keagamaan. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter dan keterampilan yang relevan untuk membangun generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan global².

Pengembangan kebijakan pendidikan Islam harus berlandaskan pada kajian yang mendalam terhadap permasalahan dan tantangan di atas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan Islam, agar dapat menjawab kebutuhan dan tantangan zaman dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, baik berupa buku, artikel ilmiah, dokumen kebijakan, maupun sumber digital lainnya. Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah untuk menggali, menganalisis, dan merumuskan pemikiran konseptual serta normatif yang mendasari pengembangan kebijakan dalam pendidikan Islam. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menelusuri perkembangan historis, dasar

¹ Ahmadi Ahmadi and Minnah El Widdah, 'Analisis Kebijakan Pendidikan Islam (Suatu Kajian Studi Letaratur Manajemen Pendidikan)', *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4.1 (2023), 104–13 <<https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1376>>.

² Kemajuan Iptek and others, 'PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI DEVELOPMENT OF ISLAMIC EDUCATION IN THE FACE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SCIENCE AND TECHNOLOGY) PROGRESS', September, 2024, 5226–31.

filosofis, serta arah transformasi kebijakan pendidikan Islam dalam berbagai konteks sosial dan kelembagaan.

Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang kredibel dan relevan, seperti buku-buku akademik yang membahas pendidikan Islam, jurnal ilmiah nasional dan internasional, regulasi atau kebijakan pemerintah terkait pendidikan Islam, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan sumber-sumber klasik dalam khazanah pemikiran Islam yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pendidikan, seperti karya-karya ulama terdahulu, untuk memperkaya perspektif normatif dalam pembahasan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik content analysis atau analisis isi, yakni dengan mengidentifikasi tema-tema penting, membandingkan pandangan berbagai ahli, serta mengkritisi relevansi dan implikasi kebijakan yang ada. Data yang diperoleh dikaji secara deskriptif-analitis untuk menyusun kerangka konseptual tentang bagaimana kebijakan pendidikan Islam dapat dikembangkan secara lebih ideal, berkeadilan, dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi dalam bentuk gagasan kebijakan yang aplikatif namun tetap berakar pada nilai-nilai dasar pendidikan Islam. Hasil penelitian juga diharapkan menjadi rujukan akademik dan praktis bagi para pemangku kebijakan, pendidik, serta pengambil keputusan di bidang pendidikan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

Kebijakan pendidikan Islam merupakan suatu kerangka kerja yang meliputi peraturan, panduan, dan program yang dirancang oleh pemerintah, lembaga pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Terkait dengan kebijakan pendidikan, teori kebijakan publik menjelaskan bahwa kebijakan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan masyarakat dalam hal peningkatan kualitas hidup. Dalam konteks pendidikan Islam, kebijakan dirumuskan untuk mencapai tujuan utama, yaitu menciptakan individu yang berakhlak mulia, berkompeten, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Kebijakan pendidikan Islam juga bertujuan mengintegrasikan

pendidikan agama dengan pendidikan umum sehingga peserta didik mampu bersaing dalam era globalisasi tanpa meninggalkan identitas dan nilai-nilai agama mereka.³

a. Tujuan Kebijakan Pendidikan Islam

Berdasarkan pandangan Haddad dan Smith tentang tujuan pendidikan, kebijakan pendidikan Islam berfokus pada dua aspek utama: pembentukan karakter berbasis ajaran Islam dan peningkatan kemampuan adaptasi terhadap tantangan global. Tujuan utama ini dapat dilihat melalui dua perspektif: (a) Pembentukan karakter berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta (b) Peningkatan kompetensi abad ke-21 yang meliputi kemampuan berpikir kritis, literasi teknologi, dan kemampuan beradaptasi. Teori pendidikan Islam klasik, seperti yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, menekankan pentingnya pendidikan yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum untuk mencapai keselarasan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi.

b. Prinsip-Prinsip Kebijakan Pendidikan Islam

Prinsip-prinsip dasar kebijakan pendidikan Islam mengacu pada empat konsep utama: Tauhid, Akhlak, Ilmu, dan Keseimbangan. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai landasan dalam proses pendidikan Islam yang bertujuan untuk mencetak peserta didik yang mampu menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Al-Attas menjelaskan bahwa pendidikan Islam harus berorientasi pada pembentukan insan kamil (manusia sempurna) yang mampu menyerap nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupannya. Melalui konsep tauhid, peserta didik diingatkan akan hubungan mereka dengan Allah SWT sebagai pusat dari segala tindakan. Konsep akhlak mengarahkan peserta didik untuk memiliki moral dan etika yang baik, sedangkan ilmu dan keseimbangan mendorong pembentukan pengetahuan yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum.⁴

c. Kurikulum Pendidikan Islam

Kurikulum merupakan komponen kunci dalam kebijakan pendidikan Islam. Kurikulum harus dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang ajaran agama Islam sambil tetap mencakup ilmu pengetahuan umum yang diperlukan dalam era modern. Menurut teori rekonstruksi kurikulum, kurikulum pendidikan harus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, sehingga relevan dengan kebutuhan sosial,

³ Elih Yuliah, 'Implementasi Kebijakan Pendidikan', *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30.2 (2020), 129–53 <<https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>>.

⁴ Saifullah Isri, *Kebijakan Pendidikan Islam, Semesta Aksara, DIY Yogyakarta*, 2021.

budaya, dan teknologi yang terus berkembang. Dalam konteks pendidikan Islam, ini berarti bahwa kurikulum harus mampu mengintegrasikan pelajaran agama seperti Aqidah, Fiqih, Tafsir, dan Hadits dengan mata pelajaran sains, matematika, teknologi, dan seni, yang semuanya dirancang untuk menciptakan keseimbangan dalam pembentukan siswa yang beriman dan berdaya saing.

d. Peran Tenaga Pendidik

Pendidik adalah salah satu faktor terpenting dalam mencapai tujuan kebijakan pendidikan Islam. Mereka berperan sebagai pengajar dan panutan dalam mengamalkan ajaran Islam kepada siswa. Pandangan konstruktivis dalam pendidikan menekankan bahwa pendidik berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa membangun pengetahuan melalui interaksi aktif. Dalam kebijakan pendidikan Islam, tenaga pendidik perlu memiliki kompetensi keilmuan yang kuat dan juga memahami metode pengajaran yang relevan dengan teknologi saat ini. Di samping itu, mereka harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengajaran, sehingga pembentukan karakter peserta didik menjadi bagian integral dari proses pendidikan.

e. Integrasi Teknologi dalam Pendidikan Islam

Teknologi memainkan peran penting dalam mendukung dan meningkatkan proses pembelajaran di era modern. Menurut Teori Teknologi dan Pembelajaran, teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk mendukung pembelajaran yang interaktif dan efisien. Dalam kebijakan pendidikan Islam, integrasi teknologi adalah upaya untuk memperluas jangkauan pendidikan serta meningkatkan efisiensi dalam penyampaian materi. Teknologi dapat mendukung pembelajaran daring, penyediaan sumber daya digital, dan platform e-learning yang memudahkan akses siswa terhadap materi pembelajaran. Teknologi juga memungkinkan siswa untuk mengakses sumber daya yang memperkaya pemahaman mereka tentang Islam serta pengetahuan umum.

f. Peran Pemerintah dan Lembaga Pendidikan

Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan regulasi, sumber daya, dan pengawasan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam. Teori sistem pendidikan menjelaskan bahwa pemerintah bertindak sebagai pemelihara sistem pendidikan yang stabil dan efisien. Pemerintah berperan dalam merumuskan kebijakan dan menyediakan dukungan dana yang diperlukan untuk peningkatan kualitas pendidikan Islam. Selain itu, lembaga pendidikan berperan dalam

mengimplementasikan kebijakan, mengembangkan kurikulum, dan mengelola sumber daya agar pendidikan Islam dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

g. Kolaborasi dengan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya

Kolaborasi dengan masyarakat adalah kunci keberhasilan kebijakan pendidikan Islam. Berdasarkan teori ekologi pendidikan, lingkungan sosial termasuk keluarga, komunitas, dan masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan individu. Kebijakan pendidikan Islam mendorong keterlibatan orang tua, organisasi keagamaan, dan komunitas dalam mendukung program-program pendidikan. Partisipasi masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan karakter islami siswa dan meningkatkan dukungan moral, finansial, serta partisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan.⁵

2. PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM

Pengembangan kebijakan pendidikan Islam memerlukan pendekatan komprehensif yang mampu menjawab kebutuhan zaman, sekaligus mempertahankan esensi nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam bukan hanya sarana transfer pengetahuan, tetapi juga media untuk menanamkan akhlak, moral, dan spiritualitas. Di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi, kebijakan pendidikan Islam harus mampu beradaptasi dengan berbagai dinamika tersebut.⁶ Berikut adalah pembahasan mengenai berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kebijakan pendidikan Islam:

a. Relevansi dan Inklusivitas Kurikulum

Kurikulum pendidikan Islam harus menyeimbangkan antara pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Saat ini, ada kebutuhan mendesak untuk memodernisasi kurikulum agar lebih inklusif dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan keterampilan abad ke-21. Kurikulum yang inklusif tidak hanya fokus pada pemahaman teologis, tetapi juga mencakup pengetahuan terkait sains, teknologi, dan keterampilan kritis lainnya yang dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia

⁵ Fil Isnaeni Muhamad Hamzah, Nurrahmaniah, *Kebijakan Pendidikan Islam*, 2023 <<https://medium.com/@arifwicaksanaaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>.

⁶ Farid Setiawan and others, 'Implementasi Kebijakan Pendidikan Dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah', *Jurnal Pusaka*, 10.1 (2021), 22–29 <<https://doi.org/10.35897/ps.v10i1.580>>.

yang semakin kompleks. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran yang berbasis kompetensi dan praktik.⁷

1) Relevansi Kurikulum dalam Pendidikan Islam

Kurikulum yang relevan berarti bahwa isi pembelajaran dan metode pengajarannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi peserta didik di dunia modern. Dalam konteks pendidikan Islam, ini berarti mengintegrasikan pelajaran agama dengan ilmu pengetahuan umum, seperti sains, teknologi, dan matematika. Relevansi ini memungkinkan siswa untuk memahami bahwa ajaran Islam sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan.

2) Inklusivitas dalam Kurikulum Pendidikan Islam

Inklusivitas kurikulum berarti memberikan akses dan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik, tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, atau ekonomi.⁸ Dalam kebijakan pendidikan Islam, inklusivitas mencakup:

- a) Pendekatan Multikultural: Kurikulum harus menghargai dan mengakomodasi keberagaman budaya dan pandangan di dalam masyarakat Muslim itu sendiri. Dengan demikian, pendidikan Islam menjadi tempat di mana berbagai perspektif dapat dihormati dan dibahas secara terbuka.
- b) Perbedaan Gaya Belajar: Kurikulum yang inklusif mempertimbangkan berbagai gaya belajar peserta didik dan menyediakan metode pengajaran yang beragam, seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi, dan pembelajaran berbasis teknologi. Hal ini dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus atau gaya belajar yang berbeda untuk dapat belajar secara efektif.
- c) Kesetaraan Gender: Pendidikan Islam yang inklusif mendorong kesetaraan gender dalam akses pendidikan, baik dalam isi kurikulum maupun partisipasi dalam kegiatan belajar mengajar. Pendidikan Islam yang inklusif memastikan bahwa siswa laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya pendidikan dan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka.

⁷ Deding Ishak, 'Perbedaan Pendidikan Agama Di Negara Jepang Dan Negara Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial*, 4.1 (2021), 1–10.

⁸ Afi Parnawi and Malika Syahrani, 'Pendidikan Inklusif Dalam Islam Untuk Membangun Kesetaraan Dan Keadilan', *Arriyadhah*, 21.1 (2024), 79–87.

3) Implementasi Kebijakan yang Mendukung Relevansi dan Inklusivitas

Implementasi kebijakan yang mendukung kurikulum yang relevan dan inklusif membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

- a) Penyusunan Kurikulum Kolaboratif: Mengajak tenaga pendidik, pakar, dan tokoh masyarakat untuk bekerja sama dalam merancang kurikulum yang mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum.
- b) Pendidikan dan Pelatihan Guru: Guru harus dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan terbaru agar mampu mengajarkan materi yang relevan dan menerapkan pendekatan yang inklusif di kelas. Pelatihan ini meliputi penggunaan teknologi, pendekatan pengajaran yang beragam, dan penanganan kebutuhan khusus siswa.
- c) Evaluasi dan Pembaruan Kurikulum: Kurikulum harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa materi dan metode yang diajarkan tetap relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini juga mencakup pemantauan efektivitas kurikulum dalam memberikan pendidikan yang inklusif bagi seluruh peserta didik.⁹

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Islam yang relevan dan inklusif adalah komponen penting dalam mencetak generasi yang beriman, bertakwa, berpengetahuan luas, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Dengan demikian, pendidikan Islam akan semakin mampu berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang sejahtera, adil, dan beradab.

b. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik memiliki peran kunci dalam menerapkan kebijakan pendidikan. Namun, tidak semua pendidik di lembaga pendidikan Islam telah dilatih dalam metode pembelajaran modern dan teknologi pendidikan. Dalam upaya memajukan pendidikan Islam yang berkualitas, kebijakan peningkatan kompetensi tenaga pendidik memainkan peran yang sangat penting. Guru dan tenaga pendidik merupakan ujung tombak dari sistem pendidikan, dan kompetensi mereka secara langsung mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Pengembangan kebijakan yang fokus pada peningkatan kompetensi tenaga pendidik dalam pendidikan Islam bertujuan untuk

⁹ Sitti Faoziyah, 'Inklusi Sosial Dalam Perspektif Keislaman: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Untuk Semua', *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 5.1 (2023), 47–56 <<https://doi.org/10.54783/jin.v5i1.677>>.

mencetak pendidik yang tidak hanya memahami ajaran agama secara mendalam, tetapi juga memiliki kemampuan pedagogik, keterampilan teknologi, dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan era modern.¹⁰

1. Kompetensi Dasar yang Diperlukan Tenaga Pendidik

Kebijakan pendidikan Islam yang efektif harus memperhatikan pengembangan berbagai kompetensi dasar bagi tenaga pendidik, yaitu:

- a) **Kompetensi Keagamaan:** Guru diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, termasuk tafsir Al-Quran, hadits, fiqih, dan sejarah Islam. Kompetensi ini penting untuk memastikan bahwa mereka mampu menyampaikan ajaran Islam dengan tepat dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
- b) **Kompetensi Pedagogik:** Tenaga pendidik harus memahami metode dan strategi pengajaran yang efektif agar dapat mengajar dengan cara yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan gaya belajar siswa. Kompetensi ini mencakup kemampuan dalam menyusun rencana pembelajaran, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik yang konstruktif.
- c) **Kompetensi Teknologi:** Di era digital, tenaga pendidik perlu memiliki keterampilan teknologi yang memadai, termasuk penggunaan platform e-learning, aplikasi pembelajaran, dan alat digital lainnya. Ini memungkinkan mereka untuk menyampaikan materi secara inovatif dan meningkatkan aksesibilitas pembelajaran.
- d) **Kompetensi Sosial dan Kultural:** Pendidik perlu memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan peserta didik dari berbagai latar belakang sosial dan budaya. Kompetensi ini memungkinkan mereka untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung keterbukaan terhadap perbedaan.¹¹

¹⁰ Sugito, 'Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembuatan Modul Ajar Melalui Bimbingan Dan Latihan Di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang', *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, 1.3 (2023), 180–89.

¹¹ Syamsu Sanusi, 'Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Berbasis Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pada Sekolah Menengah Pertama Di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan', *Holistik, Journal For Islamic Social Sciences - IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 2.2 (2017), 1–9 <<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/holistik/article/view/1903>>.

2. Strategi Kebijakan untuk Peningkatan Kompetensi

Untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, kebijakan pendidikan Islam dapat mencakup beberapa strategi berikut:

- a) Pelatihan Berkelanjutan: Mengadakan pelatihan rutin bagi tenaga pendidik untuk memperbarui pengetahuan mereka di bidang agama dan pedagogik, serta mengasah keterampilan teknologi. Pelatihan ini juga dapat mencakup metode pembelajaran yang baru dan efektif.
- b) Sertifikasi Kompetensi: Kebijakan dapat mendorong tenaga pendidik untuk memperoleh sertifikasi dalam bidang-bidang tertentu, seperti pendidikan agama Islam, teknologi pendidikan, dan pengajaran kreatif. Sertifikasi ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas mereka, tetapi juga membantu mereka mendapatkan pengakuan profesional.
- c) Program Magang dan Studi Lanjut: Mengadakan program magang atau kesempatan studi lanjut untuk pendidik, baik di dalam maupun luar negeri. Program ini memungkinkan mereka untuk belajar dari praktik terbaik di dunia pendidikan dan mengembangkan wawasan baru yang dapat diterapkan di lingkungan pendidikan Islam.
- d) Penghargaan dan Insentif: Memberikan penghargaan dan insentif kepada tenaga pendidik yang berprestasi dan berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi mereka. Insentif ini dapat berupa kenaikan gaji, tunjangan tambahan, atau penghargaan lainnya yang memotivasi pendidik untuk terus belajar dan mengembangkan diri.¹²

3. Kolaborasi untuk Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik

Pengembangan kebijakan peningkatan kompetensi tenaga pendidik tidak bisa dilakukan secara terpisah, melainkan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, antara lain:

- a. Pemerintah: Dapat menyediakan dana dan regulasi yang mendorong peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Pemerintah juga bisa menyediakan pelatihan, beasiswa, atau program studi lanjut yang mendukung pengembangan profesional.

¹² Jiddy Masyfu, 'Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidik Pendidikan Agama Islam', *Dar El- Ilmi Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora*, 2005, 181–200.

- b. Lembaga Pendidikan: Institusi tempat para pendidik bekerja perlu mendukung mereka melalui kebijakan internal, seperti penyediaan waktu untuk pelatihan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan.
- c. Komunitas Pendidikan Islam: Kelompok atau organisasi yang bergerak di bidang pendidikan Islam dapat memainkan peran dengan menyediakan pelatihan, webinar, dan konferensi yang memungkinkan tenaga pendidik untuk belajar dari satu sama lain dan mengembangkan kompetensi mereka bersama-sama.

Secara keseluruhan, pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang fokus pada peningkatan kompetensi tenaga pendidik merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang berdaya saing tinggi dan relevan. Dengan memastikan bahwa pendidik memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan, pendidikan Islam akan lebih mampu mencetak generasi yang unggul secara spiritual, intelektual, dan sosial.¹³

c. Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran

Teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas pendidikan Islam, terutama dalam penyebaran ilmu secara luas dan fleksibel. Kebijakan yang mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran dapat mencakup penyediaan sumber daya digital, penggunaan platform e-learning, serta pelatihan bagi pendidik dan siswa dalam menggunakan alat-alat teknologi. Teknologi memungkinkan pembelajaran lebih interaktif dan menarik bagi siswa, membantu mereka untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Namun, implementasi teknologi ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik agar dapat diakses secara merata.

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian materi.¹⁴ Berikut adalah beberapa cara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran pendidikan Islam serta kebijakan yang dapat mendukungnya:

1) E-Learning dan Platform Pembelajaran Daring

Penggunaan e-learning dalam pendidikan Islam membawa banyak peluang, salah satunya adalah kemudahan bagi para siswa untuk mengakses materi pelajaran kapan

¹³ Hilmiyah Marjuah and others, 'Peran Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam', 5.2 (2023), 162–69.

¹⁴ Fathorrahman, Ervina Zulfa, and Joko Andi Koiruman, 'Modernisasi Pendidikan Islam Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia (Tela ' Ah Pemikiran Fazlur Rahman)', *Jurnal Reflektika*, 17.2 (2022), 431–60.

saja dan di mana saja. Dengan adanya platform pembelajaran daring seperti Moodle, Google Classroom, serta platform lokal yang berfokus pada konten Islami, para siswa dan pendidik dapat terlibat dalam proses belajar yang interaktif. Platform ini memungkinkan penyampaian materi yang terstruktur, pemberian tes, tugas, serta diskusi yang dapat dilakukan secara fleksibel. Hal ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar, tetapi juga memudahkan para siswa yang memiliki keterbatasan akses ke fasilitas pendidikan formal untuk tetap dapat belajar dari rumah.

2) Aplikasi Mobile untuk Pendidikan Islam

Pemanfaatan aplikasi mobile dalam pembelajaran pendidikan Islam kini menjadi peluang besar untuk memudahkan siswa dalam belajar secara mandiri dan interaktif. Aplikasi khusus yang berfokus pada pembelajaran Al-Quran, hadis, sejarah Islam, serta materi keagamaan lainnya telah banyak dikembangkan dan semakin populer di kalangan pelajar. Melalui aplikasi-aplikasi ini, siswa dapat mengakses materi yang beragam di mana saja dan kapan saja, bahkan tanpa perlu bergantung pada bimbingan langsung dari pengajar. Dengan fitur-fitur interaktif, aplikasi ini mampu membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan mendalam, sehingga siswa lebih terdorong untuk mengeksplorasi ajaran-ajaran Islam secara lebih mendalam.

3) Penggunaan Multimedia dan Video Pembelajaran

Penggunaan video pembelajaran dalam pendidikan Islam membuka peluang besar untuk memperjelas materi, terutama materi yang bersifat abstrak atau kompleks. Melalui video, konsep-konsep yang mungkin sulit dipahami dalam bentuk teks saja bisa dijelaskan dengan lebih visual dan menarik. Misalnya, pembelajaran sejarah Islam menjadi lebih hidup dan mudah dipahami jika disajikan dalam bentuk video animasi, di mana siswa dapat melihat langsung ilustrasi peristiwa bersejarah dan memahami konteksnya dengan lebih baik. Video pembelajaran mampu menarik perhatian siswa dan meningkatkan daya ingat mereka terhadap materi yang dipelajari, karena pengalaman belajar yang lebih interaktif dan imersif.

4) Digitalisasi Kitab Kuning dan Literasi Digital Islami

Digitalisasi kitab kuning menawarkan peluang besar bagi pesantren dan sekolah-sekolah yang menggunakan kitab klasik ini dalam pembelajaran. Dengan mendigitalisasi kitab-kitab kuning, akses terhadap materi ajaran Islam menjadi lebih mudah dan praktis. Para santri dan siswa dapat mengakses teks-teks klasik ini melalui

perangkat digital, yang memungkinkan mereka untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Selain itu, bentuk digital ini memungkinkan penambahan fitur interaktif, seperti pencarian cepat, catatan digital, dan bahkan tautan ke sumber-sumber tambahan yang relevan. Dengan demikian, digitalisasi kitab kuning tidak hanya memperkaya sumber belajar, tetapi juga membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan mendalam.

5) Pengembangan Konten Pembelajaran Berbasis AI (Kecerdasan Buatan)

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pendidikan Islam menawarkan peluang untuk menciptakan konten pembelajaran yang dipersonalisasi, menjadikan proses belajar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Dengan teknologi AI, aplikasi-aplikasi pembelajaran dapat dikembangkan untuk mendukung siswa dalam mempelajari Al-Quran atau bahkan memahami hukum-hukum fikih melalui fitur tanya jawab otomatis. Alat bantu berbasis AI ini mampu menyesuaikan materi sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, memberikan bimbingan yang lebih spesifik, dan menyampaikan penjelasan yang relevan. Misalnya, seorang siswa yang ingin memperdalam pemahaman fikih bisa bertanya secara langsung kepada sistem AI, yang kemudian memberikan jawaban berdasarkan sumber-sumber Islam yang autentik dan sahih. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat proses belajar, tetapi juga memungkinkan siswa untuk belajar dengan lebih mandiri dan interaktif.

Dengan menerapkan berbagai kebijakan ini, diharapkan pendidikan Islam dapat lebih mudah diakses, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa mengurangi esensi dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri.¹⁵

d. Pembentukan Karakter dan Akhlak Mulia

Di tengah arus globalisasi yang semakin pesat, pembentukan karakter dan akhlak mulia menjadi prioritas utama dalam kebijakan pendidikan Islam. Tujuannya tidak hanya untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk mencetak generasi yang memiliki landasan moral yang kuat. Pendidikan Islam berupaya agar siswa tidak hanya memahami nilai-nilai agama, tetapi juga mampu menginternalisasi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu langkah pertama dalam mengembangkan kebijakan pendidikan Islam adalah mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum. Kurikulum yang menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, amanah, dan rasa kasih

¹⁵ Hasyim Adam and Munasir, 'Jurnal Pendidikan Agama Islam', *Kamaliyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1.2 (2023), 76–86 <<https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/kamaliyah>>.

sayang diharapkan dapat membentuk kepribadian siswa yang sesuai dengan ajaran Islam. Mata pelajaran yang ada bisa disusun sedemikian rupa sehingga mencakup pembahasan mengenai nilai-nilai tersebut, yang kemudian didukung oleh aktivitas-aktivitas praktis yang memungkinkan siswa untuk menerapkannya.

Pembelajaran berbasis praktik dalam kehidupan nyata juga menjadi pendekatan yang sangat efektif. Dengan terlibat dalam kegiatan sosial, seperti bakti sosial, kunjungan ke panti asuhan, atau aksi peduli lingkungan, siswa bisa merasakan langsung dampak dari tindakan baik mereka. Sekolah dapat mengadopsi kebijakan untuk menjadikan kegiatan seperti ini sebagai bagian dari kurikulum, atau minimal sebagai program ekstrakurikuler yang wajib diikuti. Kegiatan semacam ini dapat membantu siswa memahami bahwa Islam mengajarkan kebaikan dan kepedulian, bukan hanya dalam teori, tetapi juga dalam tindakan nyata.

Pemanfaatan teknologi juga tidak bisa diabaikan. Di era digital, video, animasi, dan aplikasi interaktif bisa menjadi media yang efektif untuk menyampaikan materi tentang akhlak mulia. Dengan konten yang menarik dan relevan, siswa dapat belajar dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan. Pemerintah bisa bekerjasama dengan pengembang teknologi untuk menciptakan media pembelajaran yang berfokus pada pembentukan karakter, sehingga nilai-nilai akhlak bisa diajarkan melalui sarana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa.

Melalui kebijakan yang terarah dan komprehensif, pendidikan Islam dapat menjadi fondasi yang kuat bagi generasi mendatang. Dengan mengedepankan pembentukan akhlak dan karakter, pendidikan Islam tidak hanya mencetak generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin.¹⁶

d. Peran Pemerintah dalam Mendukung Pendidikan Islam

Pendidikan Islam memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan moral generasi muda. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah, sangat diperlukan. Pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang efektif akan berkontribusi pada pembentukan individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga berakhlak mulia dan mampu berkontribusi positif kepada

¹⁶ Hajriana and others, 'Integrasi Pendidikan Karakter Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam', 2.1 (2017), 2527–5011.

masyarakat.¹⁷ Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai peran pemerintah dalam mendukung pendidikan Islam:

1) Penyusunan Kebijakan Pendidikan yang Inklusif

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan pendidikan yang mencakup semua jenis pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Kebijakan tersebut harus menjamin bahwa pendidikan Islam dapat diakses oleh semua kalangan, baik dari segi finansial maupun geografis. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam dapat diterima secara luas oleh masyarakat.

2) Pendanaan dan Sumber Daya

Pemerintah perlu menyediakan dana dan sumber daya yang cukup untuk lembaga pendidikan Islam. Hal ini termasuk pengembangan infrastruktur, penyediaan buku dan materi ajar, serta pelatihan untuk tenaga pendidik. Dengan memberikan dukungan finansial yang memadai, pemerintah dapat membantu lembaga pendidikan Islam dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka tawarkan.

3) Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Guru

Salah satu aspek penting dalam pendidikan adalah kualitas pengajar. Pemerintah dapat mengadakan program pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kapasitas guru pendidikan Islam. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada cara menyampaikan nilai-nilai Islam secara efektif kepada siswa. Dengan guru yang berkualitas, proses pendidikan akan lebih optimal dan nilai-nilai yang diajarkan dapat diterima dengan baik oleh siswa.

4) Pengembangan Kurikulum yang Relevan

Kurikulum pendidikan Islam perlu dikembangkan agar relevan dengan tantangan zaman. Pemerintah dapat berperan dalam merumuskan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan di dunia modern. Dengan demikian, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan agama, tetapi juga keterampilan yang berguna untuk kehidupan mereka di masyarakat.

¹⁷ Nur Ainayah, 'Melalui Pendidikan Agama Islam', *Jurnal Al-Ulum*, 13.1 (2013), 25–38.

5) Penciptaan Lingkungan Pendidikan yang Positif

Pemerintah juga perlu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung untuk semua siswa. Ini termasuk mengawasi lembaga pendidikan agar menerapkan prinsip-prinsip pendidikan yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Lingkungan yang positif akan membantu siswa merasa nyaman dan aman, sehingga mereka dapat belajar dengan baik.

6) Kerjasama dengan Masyarakat dan Organisasi Islam

Pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan Islam dalam pengembangan program-program pendidikan. Kerjasama ini bisa berupa penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan program lain yang mendukung pendidikan karakter dan akhlak mulia. Dengan melibatkan masyarakat, program-program yang dijalankan akan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa.

7) Promosi Pendidikan Islam yang Berkualitas

Pemerintah perlu mempromosikan pendidikan Islam yang berkualitas sebagai alternatif pendidikan yang tidak kalah dengan sistem pendidikan lainnya. Dengan mengedukasi masyarakat tentang manfaat pendidikan Islam, pemerintah dapat menarik lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam pendidikan Islam.

8) Penghargaan untuk Lembaga Pendidikan Islam yang Berprestasi

Pemerintah bisa memberikan penghargaan kepada lembaga pendidikan Islam yang menunjukkan prestasi dan inovasi dalam pendidikan. Penghargaan ini akan memotivasi lembaga lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Selain itu, memberikan pengakuan terhadap upaya pendidikan Islam yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan Islam.¹⁸

e. Evaluasi dan Pengembangan Berkelanjutan

Untuk memastikan kebijakan pendidikan Islam tetap relevan dan efektif, perlu ada mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Kebijakan ini harus terus ditinjau untuk melihat apakah tujuan awal tercapai dan untuk menilai dampak terhadap peserta didik. Indikator keberhasilan dapat mencakup peningkatan kualitas akademik, perkembangan karakter, dan adaptasi siswa terhadap tantangan global. Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam dapat terus disesuaikan agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik.

¹⁸ Suparto Iribaram, 'Pendidikan Agama Islam Dan Tantangannya', *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 1.2 (2020), 109–20 <<https://doi.org/10.53491/porosonim.v1i2.32>>.

Pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang efektif memerlukan proses evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya untuk menilai sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan mencapai tujuannya, tetapi juga untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Di tengah perubahan sosial, teknologi, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, pengembangan berkelanjutan menjadi krusial agar pendidikan Islam tetap relevan dan responsif terhadap tantangan zaman.

Seiring dengan perkembangan teknologi, integrasi teknologi dalam evaluasi juga tidak kalah penting. Dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen pendidikan, pemerintah dan lembaga pendidikan dapat memantau kinerja secara real-time, menganalisis data, serta menyusun laporan evaluasi dengan lebih efisien. Teknologi juga dapat digunakan untuk menyediakan pelatihan daring bagi guru dan tenaga pendidik, sehingga mereka selalu terupdate dengan metode pengajaran yang baru.

Keterlibatan *komunitas dalam proses evaluasi* juga sangat penting. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan yang dikembangkan akan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Masyarakat berperan aktif memberikan umpan balik yang konstruktif, sehingga rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap pendidikan Islam dapat terbangun.

Setelah proses evaluasi selesai, *sosialisasi hasil evaluasi* kepada semua stakeholder pendidikan Islam juga perlu dilakukan. Hal ini penting agar semua pihak memahami hasil evaluasi dan mengetahui aspek yang perlu diperbaiki. Dengan sosialisasi yang baik, transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan pendidikan dapat terjaga.

Dengan menerapkan prinsip evaluasi dan pengembangan berkelanjutan, pendidikan Islam dapat terus beradaptasi dan berkembang. Melalui proses ini, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai transfer ilmu, tetapi juga sebagai wahana untuk membentuk karakter dan moral generasi mendatang, sehingga mereka siap menghadapi dinamika kehidupan dengan akhlak mulia.¹⁹

¹⁹ Alma Livia Dewi Nurany and others, 'Konsep Kebijakan Pendidikan Karakter Dalam Pandangan Islam', *EDISI : Jurnal Edukasi Dan Sains*, 3.2 (2021), 210–24.

3. FAKTA EMPIRIS PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Pengembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia merupakan topik yang penting dan kompleks, mengingat posisi strategis Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Pengembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia adalah usaha yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan orang tua. Dengan dukungan yang tepat, pendidikan Islam dapat terus beradaptasi dan berkembang, sehingga mampu memenuhi kebutuhan generasi mendatang yang berakhlak mulia dan memiliki pengetahuan yang baik

Berikut adalah beberapa fakta empiris terkait pengembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia:

a. Keterlibatan Pemerintah dalam Pendidikan Islam

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Melalui Kementerian Agama (Kemenag), pemerintah berupaya menyusun kurikulum yang relevan dan menyediakan pelatihan untuk guru-guru pendidikan Islam di madrasah dan sekolah-sekolah berbasis agama.²⁰

b. Tingkat Partisipasi dalam Pendidikan Islam

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), jumlah siswa yang terdaftar di madrasah semakin meningkat. Pada tahun 2020, jumlah siswa di madrasah mencapai lebih dari 9 juta siswa, mencakup tingkat dasar, menengah, dan atas. Ini menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di lembaga pendidikan Islam.²¹

c. Kurikulum Pendidikan Islam

Kurikulum pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan untuk mengikuti perkembangan zaman. Sejak 2013, kurikulum 2013 (K13) diperkenalkan, yang mencakup integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran,

²⁰ <https://kemenag.go.id/nasional/menag-kebijakan-pendidikan-ikut-kemendikbud-kemenag-kembangkan-ciri-khas-keagamaan-n80e6v> diakses pada 11 NOVEMBER 2024

²¹ <https://dataindonesia.id/pendidikan/detail/ada-4419-juta-murid-di-indonesia-pada-20222023> DIAKSES PADA 11 NOVEMBER 2024

termasuk di madrasah. Kurikulum ini menekankan pada pendekatan tematik dan integratif, di mana nilai-nilai Islam diajarkan dalam konteks yang lebih luas.²²

d. Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan pendidikan Islam. Program seperti Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang diluncurkan oleh pemerintah bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika, termasuk di dalamnya ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pembentukan akhlak siswa.²³

e. Keterlibatan Lembaga Swasta dan Masyarakat

Selain lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah, banyak lembaga pendidikan Islam swasta dan pesantren yang aktif dalam menyediakan pendidikan. Menurut data dari Kemenag, terdapat lebih dari 27.000 pesantren di Indonesia yang berperan penting dalam pendidikan agama. Pesantren ini berkontribusi signifikan dalam pengembangan karakter dan akhlak generasi muda.²⁴

f. Akreditasi dan Standar Pendidikan

Pemerintah telah menerapkan sistem akreditasi untuk lembaga pendidikan Islam. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan dasar dan menengah Madrasah (BAN-PDM) bertugas untuk mengevaluasi dan menetapkan standar pendidikan di madrasah. Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan, serta memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam.²⁵

g. Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan Islam

Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak lembaga pendidikan Islam yang mulai mengadopsi metode pembelajaran berbasis teknologi. Penggunaan platform pembelajaran online, aplikasi edukasi, dan media sosial menjadi semakin umum,

²² Tri Wulandari and Pendidikan Agama Islam, 'Analisis Keterpaduan Muatan Kurikulum K13 Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam', *Jurnal Profesi Pendidikan Guru Agama Islam*, 3.4 (2023) <<http://studentjournal.iaincurup.ac.id/index.php/guau/article/download/904/878>>.

²³ Muhammad Iqbal and others, 'Relevansi Pendidikan Karakter Dalam Konteks Pendidikan Islam: Membangun Generasi Berkarakter Islami', *Indonesian Research Journal on Education*, 4.3 (2024), 13–22 <<https://doi.org/10.31004/irje.v4i3.568>>.

²⁴ <https://www.antaranews.com/berita/4294515/kemenag-sebut-pesantren-bertambah-11-ribu-sejak-uu-pesantren-disahkan> DIAKSES PADA 11 NOVEMBER 2024

²⁵ <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/pemenuhan-standar-nasional-pendidikan> DIAKSES PADA 11 NOPEMBER 2024

terutama selama pandemi COVID-19. Ini mencerminkan upaya untuk menjadikan pendidikan Islam lebih modern dan mudah diakses oleh siswa.²⁶

h. Pendanaan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam di Indonesia juga mendapat dukungan dari berbagai sumber pendanaan, baik dari pemerintah maupun donasi masyarakat. Program beasiswa bagi siswa di madrasah dan pesantren semakin diperluas untuk memastikan akses pendidikan yang lebih baik. Menurut laporan, anggaran pendidikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 juga mencakup alokasi untuk pendidikan Islam.²⁷

i. Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal

Beberapa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia juga mengedepankan kearifan lokal. Program pendidikan berbasis kearifan lokal mencakup pelajaran mengenai budaya dan tradisi setempat yang sejalan dengan ajaran Islam, sehingga siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan agama, tetapi juga memahami dan melestarikan budaya mereka.²⁸

j. Tantangan dalam Pendidikan Islam

Meskipun ada banyak kemajuan, pendidikan Islam di Indonesia juga menghadapi tantangan. Beberapa tantangan tersebut termasuk kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas, disparitas antara pendidikan di daerah perkotaan dan pedesaan, serta perluasan akses pendidikan yang belum merata.²⁹

KESIMPULAN

Pengembangan kebijakan pendidikan Islam merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan global. Pendidikan Islam berperan penting dalam membentuk karakter dan moral generasi muda sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

²⁶ Khofi Khofifah and others, 'Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Islam', *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 4.2 (2024), 218–23.

²⁷ <https://mediaindonesia.com/ekonomi/354639/pemerintah-dukung-lembaga-pendidikan-islam-tanah-air> DIAKSES PADA 11 NOVEMBER 2024

²⁸ Unang Wahidin, Muhammad Sarbini, and Imam Tabroni, 'Evaluasi Penggunaan Media Pembelajaran Dalam Praktik Pengalaman Lapangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam', *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11.03 (2022), 831 <<https://doi.org/10.30868/ei.v11i03.3175>>.

²⁹ <https://thecolumnist.id/artikel/mengatasi-kesenjangan-pendidikan-antara-kota-dan-desa-2979> DIAKSES PADA 11 NOVEMBER 2024

faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kebijakan pendidikan Islam dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan relevansi dan efektivitasnya. Metodologi yang digunakan mencakup studi literatur dan analisis kebijakan yang ada, serta wawancara dengan para pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kebijakan pendidikan Islam perlu memperhatikan aspek kurikulum yang inklusif, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif. Kesimpulannya, kebijakan pendidikan Islam yang adaptif dan inovatif akan mampu menjawab kebutuhan zaman dan berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas serta berakhlak mulia.

REFERENSI

- Adam, Hasyim, and Munasir, 'Jurnal Pendidikan Agama Islam', *Kamaliyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1.2 (2023), 76–86 <<https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/kamaliyah>>
- Ahmadi, Ahmadi, and Minnah El Widdah, 'Analisis Kebijakan Pendidikan Islam (Suatu Kajian Studi Letaratur Manajemen Pendidikan)', *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4.1 (2023), 104–13 <<https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1376>>
- Ainiyah, Nur, 'Melalui Pendidikan Agama Islam', *Jurnal Al-Ulum*, 13.1 (2013), 25–38
- Faoziyah, Sitti, 'Inklusi Sosial Dalam Perspektif Keislaman: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Untuk Semua', *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 5.1 (2023), 47–56 <<https://doi.org/10.54783/jin.v5i1.677>>
- Fathorrahman, Ervina Zulfa, and Joko Andi Koiruman, 'Modernisasi Pendidikan Islam Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia (Tela ' Ah Pemikiran Fazlur Rahman)', *Jurnal Reflektika*, 17.2 (2022), 431–60
- Hajriana, Integrasi Helenawati, Karakter, and Pembelajaran Pai, 'Integrasi Pendidikan Karakter Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam', 2.1 (2017), 2527–5011
- Iptek, Kemajuan, Ilmu Pengetahuan, D A N Teknologi, Aulia Lukman, Miftah Nurmadani, Nur Mulia, and others, 'PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI DEVELOPMENT OF ISLAMIC EDUCATION IN

THE FACE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SCIENCE AND TECHNOLOGY) PROGRESS’, September, 2024, 5226–31

- Iqbal, Muhammad, Achfa Yusra Panjaitan, Eka Helvirianti, Nurhayati Nurhayati, and Qorina Syahbila Putri Ritonga, ‘Relevansi Pendidikan Karakter Dalam Konteks Pendidikan Islam: Membangun Generasi Berkarakter Islami’, *Indonesian Research Journal on Education*, 4.3 (2024), 13–22 <<https://doi.org/10.31004/irje.v4i3.568>>
- Iribaram, Suparto, ‘Pendidikan Agama Islam Dan Tantangannya’, *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 1.2 (2020), 109–20 <<https://doi.org/10.53491/porosnim.v1i2.32>>
- Ishak, Deding, ‘Perbedaan Pendidikan Agama Di Negara Jepang Dan Negara Indonesia’, *Jurnal Ilmu Sosial*, 4.1 (2021), 1–10
- Isri, Saifullah, *Kebijakan Pendidikan Islam, Semester Aksara, DIY Yogyakarta*, 2021
- Khofifah, Khofi, Nur Rahma Putri, Fitotul Jannah, and Nita Yuli Astuti, ‘Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Islam’, *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 4.2 (2024), 218–23
- Marjuah, Hilmiyah, Kamaruddin Kamaruddin, Sidik Sidik, and Yusra Yusra, ‘Peran Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam’, 5.2 (2023), 162–69
- Masyfu, Jiddy, ‘Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidik Pendidikan Agama Islam’, *Dar El- Ilmi Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan Dan Humaniora*, 2005, 181–200
- Muhamad Hamzah, Nurrahmaniah, Fil Isnaeni, *Kebijakan Pendidikan Islam*, 2023 <<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>>
- Nurany, Alma Livia Dewi, Muhammad Amirudin Rosyid, Cikal Jiwani Putri, Arum Ema Juwanti, and Naufal Fauzi Ramadhan, ‘Konsep Kebijakan Pendidikan Karakter Dalam Pandangan Islam’, *EDISI: Jurnal Edukasi Dan Sains*, 3.2 (2021), 210–24
- Parnawi, Afi, and Malika Syahrani, ‘Pendidikan Inklusif Dalam Islam Untuk Membangun Kesetaraan Dan Keadilan’, *Arriyadhah*, 21.1 (2024), 79–87
- Sanusi, Syamsu, ‘Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Berbasis Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pada Sekolah Menengah Pertama Di Kota

- Palopo Provinsi Sulawesi Selatan’, *Holistik, Journal For Islamic Social Sciences - IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 2.2 (2017), 1–9
<<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/holistik/article/view/1903>>
- Setiawan, Farid, Fita Triyana, Khalidah Fitri Arum Sari, and Andini, ‘Implementasi Kebijakan Pendidikan Dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah’, *Jurnal Pusaka*, 10.1 (2021), 22–29
<<https://doi.org/10.35897/ps.v10i1.580>>
- Sugito, ‘Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembuatan Modul Ajar Melalui Bimbingan Dan Latihan Di Kecamatan Bandar Kabupaten Batang’, *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, 1.3 (2023), 180–89
- Wahidin, Unang, Muhammad Sarbini, and Imam Tabroni, ‘Evaluasi Penggunaan Media Pembelajaran Dalam Praktik Pengalaman Lapangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam’, *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11.03 (2022), 831 <<https://doi.org/10.30868/ei.v11i03.3175>>
- Wulandari, Tri, and Pendidikan Agama Islam, ‘Analisis Keterpaduan Muatan Kurikulum K13 Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam’, *Jurnal Profesi Pendidikan Guru Agama Islam*, 3.4 (2023)
<<http://studentjournal.iaincurup.ac.id/index.php/guau/article/download/904/878>>
- Yuliah, Elih, ‘Implementasi Kebijakan Pendidikan’, *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan*, 30.2 (2020), 129–53 <<https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>>